

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Maroko dalam melanjutkan normalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords di tengah penolakan domestik dan internasional. Melalui menggunakan kerangka konsep *Logics of Action* dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, berikut adalah temuan dalam penelitian:

Temuan pertama dalam mekanisme *Logics of Consequences* menunjukkan bahwa keputusan ini dilatarbelakangi oleh sejumlah perhitungan keuntungan strategis yang diperoleh Maroko, seperti keuntungan diplomatik, militer, dan ekonomi. Melalui kesepakatan normalisasi, Maroko berhasil memperoleh pengakuan dari Amerika Serikat atas klaim kedaulatannya atas wilayah Sahara Barat isu sentral dalam kebijakan luar negeri Maroko. Selain itu, kerja sama dengan Israel membuka peluang besar dalam bidang pertahanan dan keamanan, termasuk akses terhadap teknologi militer mutakhir dan pelatihan militer. Di bidang ekonomi, normalisasi ini mendorong peningkatan investasi, ekspor-impor, serta kolaborasi dalam sektor teknologi dan inovasi. Maroko juga memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisinya sebagai agen regional yang moderat dan strategis di kawasan nya. Keputusan ini bukan semata-mata didorong oleh rasionalitas ekonomi atau diplomatik, melainkan merupakan hasil dari kalkulasi strategis yang

mengintegrasikan dimensi identitas nasional dan peran negara dalam sistem internasional.

Temuan kedua dalam mekanisme *Logic of Appropriateness* menunjukkan bahwa keputusan Maroko ini bukan saja berdasarkan perhitungan rasional, namun juga berdasarkan adanya sejarah hubungan antara Maroko dan Israel yang telah terbentuk lama. Sebagai negara yang multikultural, Maroko memiliki relasi historis yang panjang bahkan jauh sebelum negara Israel berdiri. Keberadaan komunitas Yahudi di Maroko yang hidup berdampingan secara harmonis dengan Muslim Maroko sejak lama, bahkan sebelum konflik Palestina–Israel menunjukkan kedekatan historis yang telah terjalin di antara keduanya. Selain itu, interaksi tidak resmi melalui kerja sama intelijen dan diplomasi rahasia menjadi fondasi awal hubungan Maroko dan Israel jauh sebelum Abraham Accords resmi ditandatangani. Kebijakan Maroko ini dipandang sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya yang telah melekat dalam politik luar negeri Maroko sebagai negara yang inklusif dan multikultural.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Maroko menggabungkan *Logic of Consequences* (LoC) dan *Logic of Appropriateness* (LoA) dari konsep *logics of action* dalam proses merumuskan kebijakan luar negerinya terhadap Israel khususnya dalam melanjutkan normalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords. Kombinasi kedua logika ini menunjukkan bahwa keputusan Maroko untuk tetap melanjutkan normalisasi dengan Israel bukan semata hasil kalkulasi kepentingan material. Keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh norma, identitas, dan warisan historis yang membentuk persepsi serta perilaku politik luar negeri Maroko. Pemerintah Maroko sebagai representasi negara Maroko itu sendiri

lebih melihat proses normalisasi dengan Israel ini lebih banyak memberikan keuntungan dari berbagai aspek ketimbang dengan respon penolakan dan kecaman yang datang baik dari dalam dan luar negeri. Maroko juga mempertegas bahwa kebijakan normalisasi antara Maroko dan Israel ini tidak merubah posisi Maroko terkait masalah Palestina, namun justru untuk mendorong solusi dua negara. Hal ini tercermin dalam pendekatan strategisnya dengan menunda KTT Abraham Accords pada tahun 2023 sebagai respon terhadap kebijakan Israel yang dianggap menghambat proses perdamaian. Kombinasi logika inilah yang membuat Maroko masih terus melanjutkan normalisasi dengan Israel dalam kerangka perjanjian Abraham Accords.

5.2 Saran

Peneliti menyadari bahwa studi ini memiliki keterbatasan dalam cakupan waktu dan fokus yang terbatas pada aspek politik luar negeri Maroko. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian terhadap dinamika domestik jangka panjang yang dipicu oleh kebijakan normalisasi ini, khususnya dalam menelaah respon masyarakat sipil, aktor politik oposisi, dan kelompok keagamaan. Mengingat penolakan publik yang terus berlanjut, penting untuk mengeksplorasi bagaimana tekanan sosial internal dapat memengaruhi stabilitas dan arah kebijakan luar negeri Maroko di masa depan. Kajian lebih lanjut juga diharapkan dapat mengintegrasikan pendekatan interdisipliner yang melibatkan perspektif hubungan internasional, antropologi politik, dan komunikasi publik guna menangkap kompleksitas relasi antara identitas nasional, kepentingan negara, dan persepsi masyarakat. Peneliti juga merekomendasikan studi perbandingan dengan negara-negara yang turut terlibat dalam Abraham Accords untuk memahami

perbedaan konteks domestik dan strategi kebijakan luar negeri masing-masing negara.

